

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Literatur Review

Literatur *review* merupakan kerangka yang disusun oleh penulis untuk mengklasifikasikan sumber-sumber data dan informasi umum yang dikaji oleh penulis dalam penelitian. Tujuan dari literatur *review* itu sendiri adalah untuk mendapatkan pemahaman terkait permasalahan yang dikaji yakni terkait kerjasama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Suwon yang kemudian akan diolah untuk memecahkan masalah yang diteliti yang disesuaikan dengan kerangka berpikir ilmiah. Dalam hal ini penulis berusaha untuk menghimpun informasi dari tulisan terdahulu yang relevan dengan topik yang diantaranya bersumber dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah, laporan penelitian, *press release*, skripsi, dan berita-berita resmi.

Adapun beberapa **literatur review pokok** penulis diantaranya sebagai berikut:

1. Implementasi Kerjasama Sister City Kota Bandung Dengan Kota Suwon Tahun 1997-2015

Literatur review pertama merupakan sebuah tesis karya E.N. Domloboy NST, Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Tahun akademik 2014. Di dalam tulisan ini, di jelaskan bahwa kerjasama *sister city* merupakan sebuah bentuk pradiplomasi yang memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama internasional. Kota Bandung dengan segala keunggulannya membuat banyak Kota lainnya termasuk Kota-Kota yang berada di luar negeri tertarik untuk melakukan kerjasama *sister*

city. Salah satu kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Kota Bandung adalah kerjasama *sister city* dengan Kota Suwon (Korea Selatan).

Kerjasama yang sudah berlangsung sejak tahun 1997 ini tentunya mengalami pasang surut dalam implementasi program kerjasamanya. Penelitian ini membahas apa yang menjadi alasan terjadinya pasang surut di dalam kerjasama tersebut dan kemudian membaginya menjadi dua yaitu, faktor eksternal dan faktor Internal.

2. Dampak Kerjasama Sister City Kota Bandung Dengan Kota Suwon Dalam Bidang Kebudayaan dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Budaya di Kota Bandung Periode 2008-2013

Tulisan kedua merupakan sebuah skripsi karya M. Priyudi Ekanda, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Pasundan. Di dalam tulisan ini, dipaparkan bahwa arus globalisasi turut mempengaruhi sifat hubungan internasional yang bercorak transnasional, menjadi kecenderungan dunia pada saat ini. Kerjasama tersebut telah meluas tidak hanya sebatas kerjasama antar pemerintah negara saja, namun saat ini mulai melibatkan peran dari pemerintah daerah suatu negara. Lahirnya aktor pemerintah lokal tersebut merupakan awal dari munculnya sebuah kerjasama *sister city*.

Penulis berusaha menjelaskan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kerjasama antara Kota Bandung dan Kota Suwon khususnya dalam perkembangan kebudayaan di Kota Bandung itu sendiri melalui program kerja yang telah ditentukan dan yang telah diimplementasikan.

3. Kerjasama Sister City Bandung-Suwon Terhadap Pembangunan Sosial Dan Ekonomi di Kota Bandung

Tulisan ketiga merupakan sebuah skripsi karya Mariyo Saputra, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Tahun Akademik 2013. Penulis memaparkan bahwa kerjasama yang dijalin diantara kedua Kota yaitu Kota Bandung dan Kota Suwon dalam implementasinya memiliki pengaruh terhadap pembangunan sosial dan ekonomi di Kota Bandung. Diharapkan melalui interaksi diantara keduanya dapat memberikan keuntungan kepada masing-masing aktor.

Namun tentu saja akan ada kendala-kendala dalam menjalankan kerjasama tersebut, seperti tidak meratanya fokus bidang kerjasama yang diimplementasikan dan pergantian pemimpin baru menjadikan kerjasama *sister city* ini kurang dapat dibenahi secara optimal.

Dari ketiga literatur *review* pokok yang penulis ambil dan penulis kaji, terdapat beberapa persamaan, dimana ketigaanya sepakat mengatakan bahwa kerjasama *sister city* merupakan bentuk kerjasama yang berkembang seiring dengan derasny arus globalisasi. Dimana kerjasama ini memudahkan pemerintah daerah untuk membina hubungan baik dengan Kota-Kota yang berada di luar negeri. Data-data yang disajikan dalam ketiga tulisan tersebut banyak membantu penulis dalam menganalisis permasalahan yang sedang dikaji.

2.2 Kerangka Teoritis

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang di gunakan untuk membantu penulis dalam melaksanakan penelitian yaitu sebagai tolak ukur atau pembanding dalam menganalisa masalah penelitian. Dalam peneltian ini, penulis menggunakan teori pradiplomasi dan konsep-konsep seperti konsep kerjasama internasional, *sister city* dan konsep mengenai pendidikan.

Teori Pradiplomasi itu sendiri merupakan desentralisasi kekuasaan politik dan kewenangan administratif dalam sebuah proses yang terjadi pada aktor-aktor sub-nasional , institusi politik dan kebijakan politik suatu pemetintahan pusat dalam kewenangan menjalankan hubungan luar negeri, karena pemerintahan daerah merupakan implementasi dari kebijakan publik.

Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh suatu negara, sebuah diplomasi regional pada tujuannya tidak berusaha mewakili kepentingan nasional yang lebih umum dan luas, kepentingannya lebih bersifat khusus tanpa menyalahi aturan pada suatu kedaulatan negara, dan berada pada pengawasan negara. Disini dalam mengembangkan daerahnya, para aktor tersebut diberikan kebebasan untuk menentukan isu dan tujuan yang ingin dicapai dalam menjalankan mekanismenya, para aktor diplomasi regional berada di bawah kedaulatan negara, dan mengikuti sistem internasional yang berlaku, yang menjadikan negara sebagai aktor penghubung yang mendasari terjadinya hubungan tersebut, ini lah yang dimaksud dengan pradiplomasi.¹

Paradiplomasi secara relatif masih merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional. Istilah '*Paradiplomacy*' pertama kali diluncurkan pada

¹ Akbarizal AB, "*Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama Sister City*" dengan Kota Braunchweig Tahun 2000-2012, Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013.

tahun 1980-an oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos. Hal tersebut sebagai penggabungan istilah '*Parallel diplomacy*' menjadi '*Paradiplomacy*'. Menurut Aldecoa, Keating dan Boyer hal tersebut mengacu pada makna '*the foreign policy of non-central governments*'. Istilah lain yang digunakan oleh Ivo Duchacek (1990) untuk konsep ini adalah '*micro-diplomacy*'.²

Soldatos (1990), secara fungsional atau berdasarkan cakupan isu dalam paradiplomasi, membagi dua tipe paradiplomasi:³

a. Tipe pertama adalah *global paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat dalam isu-isu global atau isu-isu politik tingkat tinggi. Sebagai contoh tipe paradiplomasi ini adalah kebijaksanaan yang diambil Gubernur New York dan Gubernur New Jersey yang melarang pendaratan pesawat-pesawat Uni Soviet di wilayahnya sebagai reaksi atas penembakan pesawat Korean Airlines. Mengingat pemerintah sub nasional biasanya terlibat dalam isu-isu politik tingkat rendah, tipe paradiplomasi ini relatif jarang terjadi.

b. Tipe kedua klasifikasi Soldatos adalah *regional paradiplomacy*. Dalam tipe ini pemerintah sub nasional terlibat pada isu-isu yang berskala regional. Apabila isu-isu tersebut menyangkut komunitas yang secara geografis berbatasan langsung (*geographical contiguity*), Soldatos menyebutnya sebagai *macroregional paradiplomacy* sebaliknya bila komunitas tersebut tidak berbatasan secara langsung disebutnya sebagai *microregional paradiplomacy*. Lazimnya *regional*

² Crikemans, David, 2008 "*Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?*", hal. 34, University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium. Dikutip oleh Takdir Ali, 2013, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta. Hal.38.

³ Ivo Duchacek. 1990. Dikutip oleh Stivani Sinambela. "*Kerjasama Pemerintah Daerah Dalam Penataan Kerjasama Internasional 'Studi Kasus: Kerjasama Sister City Kota Medan dan Kota Penang*" Thesis UMY. Yogyakarta. 2014 hal. 18.

paradiplomacy ini menyangkut isu-isu politik tingkat rendah sehingga jarang menimbulkan kontroversi.

Penulis berpendapat bahwa teori paradiplomasi merupakan pendukung dari terciptanya kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Teori ini membantu penulis menganalisa peran dari pemerintah daerah sebagai aktor non negara yang dapat secara langsung melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri guna memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Kerjasama *sister city* turut berkembang seiring dengan berkembangnya arus globalisasi, globalisasi hadir mengisi setiap kehidupan seperti, politik, ekonomi, sosial-budaya dan didalam globalisasi interaksi antara bangsa-bangsa mengalami perkembangan yang signifikan. Sistem negara merupakan cara tertentu dalam mengatur kehidupan politik dimuka bumi yang memiliki akar sejarah yang dalam. Terdapat sistem negara atau sistem quasi-negara pada waktu dan tempat yang berbeda, dan dibelahan dunia yang berbeda. Sejak abad kedelapan belas hubungan antar negara-negara merdeka disebut “Hubungan Internasional” yang saat ini hubungan internasional merupakan studi tentang sistem negara global dari berbagai macam perspektif ilmiah.⁴

Hubungan internasional merupakan suatu ilmu yang interdisipliner, dimana memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lainnya dalam usaha mengkaji suatu permasalahan yang muncul yang kemudian menjadi fenomena baru. Perkembangan ilmu hubungan internasional saat ini tidak hanya mengacu pada hubungan antar negara saja, melainkan mencakup permasalahan yang ada

⁴ Robert Jackson dan George Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Terjemahan Dadan Suryadipura) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm.. 2-3

didalamnya seperti perkembangan suatu daerah atau Kota yang melibatkan kerjasama antar Kota lintas batas negara yang bersifat kompleks, seperti yang dikatakan oleh **Mohtar Mas'ood** (1990) bahwa:

“Hubungan internasional itu sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa- bangsa yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit daripada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Ia juga sangat kompleks karena setiap hubungan itu melibatkan berbagai segi lain yang koordinasinya tidak sederhana”.⁵

Dari pernyataan Mas'ood tersebut dapat disimpulkan betapa rumitnya hubungan internasional karena ini adalah suatu interaksi bukan saja antar negarabangsa yang berdaulat melainkan suatu interaksi yang memiliki aspek-aspek lainnya yang harus diperhatikan. Hubungan internasional bukan hanya tentang hubungan antar negara tetapi juga tentang hubungan transnasional, yaitu hubungan antara masyarakat, kelompok-kelompok, dan organisasi-organisasi yang berasal dari negara berbeda.

Sudah terbukti bahwa tidak satupun negara yang dapat dan mampu hidup sendiri, serta hampir setiap negara mempunyai masalah masing-masing yang tidak dapat diselesaikan sendiri. Dalam permasalahan tersebut kadang kala dibutuhkan hubungan atau bantuan dari negara lain untuk memenuhi kepentingan nasional dari suatu negara dan hal tersebut terkait dengan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan Luar Negeri adalah strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit

⁵ Mohtar Mas'ood, “Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologo, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 112

politik lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.⁶

Setiap kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun daerah, pasti akan disesuaikan dengan kepentingan nasionalnya. Adapun pengertian Kepentingan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah:

“Kepentingan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.⁷

Berdasarkan teori diatas dapat dikatakan bahwa salah satu cara untuk mewujudkan kepentingan nasional adalah dengan melakukan suatu kerjasama. Kerjasama, atau kooperasi adalah praktik seseorang atau kelompok yang bekerja di khalayak dengan tujuan atau kemungkinan metode yang disetujui bersama secara umum. Hubungan antar negara atau kerjasama antar negara dalam masyarakat internasional seringkali didasari oleh adanya persamaan diantara negara-negara tersebut, seperti persamaan keadaan geografis, ideologi, dan juga kepentingan politik dan ekonomi yang mengikat dalam hubungan kerjasama negara-negara tersebut. Pengertian dari kerjasama internasional itu sendiri menurut **Koesnadi Kartasasmita** adalah:

“Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleksnya kehidupan-kehidupan manusia dalam bermasyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena national

⁶ DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, “Pengantar Ilmu Hubungan Internasional”, Pt. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hlm. 47.

⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan yang saling membutuhkan, kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama di antara negara- negara, namun kepentingan itu tidak identik”.⁸

Dalam kaitan ini pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Kota Bandung dengan Kota Suwon adalah Kerjasama Bilateral. Menurut Kusumohamidjojo kerjasama bilateral adalah:

“Suatu bentuk kerjasama diantara negara-negara yang berdekatan secara geografis ataupun yagn jauh diseberang lautan dengan sasaran utama untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik kebudayaan dan struktur ekonomi”.⁹

Dalam ruang lingkup sosial, ekonomi, politik dan budaya, pelaksanaan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah, penerapannya merupakan jawaban dari adanya tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara, diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan Pemerintah Pusat kepada daerah.

Kerjasama antara Kota dengan Kota lainnya biasa disebut dengan istilah *sister city*. Seiring dengan perkembangan zaman di era globalisasi ini, negara-negara di dunia mulai melaksanakan pembangunan baik di bidang fisik, sarana, budaya maupun iptek. Hal tersebutlah yang kemudian mendorong negara-negara

⁸ Koesnadi Kartasasmita, Organisasi dan Administrasi Internasional (Bandung: Fisip Universitas Padjadjaran Press, 1983), hal. 83 dalam Liberty Eduardo Zwageri Mozes, “Kerjasama Indonesia – Cina Dalam Promosi dan Pemasaran Pariwisata Bersama Terhadap Peningkatan Kunjungan Wisatawan Cina Ke Indonesia”, Skripsi Fisip-HI Unpas tidak diterbitkan, 2013, hal. 12.

⁹ Budiono Kusumohamidjojo, Hubungan Internasional-Kerangka Studi Analitis, (Jakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 3.

maju menjalin kerjasama dengan negara-negara berkembang. Kerjasama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang kini kian marak diselenggarakan oleh beberapa kabupaten dan Kota di Indonesia, dikenal dengan istilah *sister city* yang secara harfiah berarti Kota kembar atau Kota bersaudara.

Dalam kegiatan *Expert meeting* BKSP (Badan Kerjasama Parlemen) Takdir Ali Mukti Dosen UMY mengatakan kebijakan *sister city* merupakan perubahan cara pandang dalam mengelola daerah dari *inward looking* berorientasi kedalam daerah menjadi *outward looking* berorientasi keluar-kompetisi. Fakta kerjasama luar negeri adalah pelaksanaan kerjasama *sister city* dengan pihak asing belum berjalan secara optimal. Banyak MOU yang tidur setelah ditandatangani (*Sleeping MOU*). Takdir menyarankan dalam *sister city* diharapkan pemerintah wajib memberikan pedoman/arahan yang jelas kepada pemda mengenai prioritas kerjasama luar negeri bagi pemda sesuai kebutuhan dan lingkaran konsentris dalam kerangka ASEAN *economic*.¹⁰

Ferry Adamhar, S.H., LL.M, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu menjelaskan bahwa Kemenlu membuat petunjuk SOP untuk kerjasama *sister city* yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/Kp/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri. Yang paling utama bahwa kesepakatan tersebut aman secara politik keamanan, keuangan, dan agama dan jelas apa yang diperjanjikan.

¹⁰DPD.go.id “ Evaluasi Program Kerjasama Siter City” dalam <http://www.dpd.go.id/berita-261-expert-meeting-bkasp-evaluasi-pelaksanaan-program-kerjasama-sister-city> diakses pada 09 Mei 2018

“Kami melihat adalah perjanjian sister city merupakan salah satu upaya untuk lebih mengikatkan diri dalam bidang kerjasama seperti sosial budaya. Ini merupakan sarana yang baik agar kita lebih aktif mempromosikan daerah yang bersifat bilateral maupun group in seperti pengembangan wilayah seperti (Brunei, Malaysia Utara dan Kalimantan Utara),” tutur ferry Adamhar.¹¹

Kerjasama *Sister City* Sendiri terbentuk karena adanya persamaan kedudukan dan status administrasi, persamaan ukuran luas wilayah dan fungsi, persamaan karakteristik sosio-kultural dan topografi kewilayahan, persamaan permasalahan yang dihadapi, dan komplementaritas antara kedua pihak dengan tujuan untuk membangun hubungan kerjasama dalam pertukaran kunjungan pejabat atau pengusaha, yang nantinya akan menimbulkan kerjasama dalam bidang barang dan jasa.¹² Perjanjian kerjasama mitra Kota atau *sister city* telah memenuhi karakter internasional dan tidak termasuk dalam perjanjian yang bersifat perdata, seperti perjanjian antar negara dengan perusahaan multinasional. Perjanjian *sister city* diselenggarakan oleh Pemerintah Propinsi atau Kabupaten maupun Kota di Indonesia dengan Pemerintah Propinsi atau Kabupaten maupun Kota di negara lain.

Penulis melihat dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nurkhaliq Djirimu mengenai “Peluang dan Tantangan Kerja Sama *Sister City* Kota Bau-Bau dan Seoul Tahun 2013.” Dalam skripsi ini Muhammad Nurkhaliq Djirimu memfokuskan penelitiannya terhadap kebudayaan dimana adanya persamaaan

¹¹ *Ibid*

¹² Akbarizal AB, “Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam menjalankan Kerjasama *Sister City* dengan Kota Braunschweig Tahun 2000-2012”, Skripsi UNIKOM, Bandung, 2013.

cara penulisan di salah satu Kota Baubau dengan aksara Korea yakni Hagul, sehingga kerja sama diantara kedua negara dapat terjalin bersama demi keberlangsungan tulisan Hagul sementara itu melalui regionalisme penulis memfokuskan adanya kerjasama regional yang respiokal, saling memahami serta berinteraksi satu sama lain. Bentuk regional tersebut dapat dilihat melalui tingkat kohesi sosial (Etnis, Ras, Bahasa, Agama, Budaya, Sejarah Kesadaran, serta Warisan Bahasa) serta kohesi ekonomi (pola-pola perdagangan) kohesi politik dan organisasi.

Berikut ini adalah peraturan daerah Bandung yang mengatur tentang kerjasama luar negeri adalah sebagai berikut :

1. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7 yaitu “ Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Gubernur lain atau Gubernur dengan Bupati/WaliKota dan/atau Gubernur, Bupati/WaliKota dengan Pihak Luar Negeri atau Pihak Ketiga yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.”
2. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 9 yaitu “ Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di luar negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.”

3. Kerjasama dengan pihak luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi : a. kerjasama dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah setingkat di luar negeri atau Kerjasama Provinsi Kembar (Sister Province); b. kerjasama dengan Badan dan Lembaga/Organisasi Internasional; dan c. kerjasama dengan Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak ketiga di luar negeri.¹³

Sister city merupakan bagian daripada sebuah rezim, melihat dari pengertian rezim itu sendiri, Krasner memberikan definisi bahwa rezim internasional merupakan serangkaian prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pembuatan keputusan dimana ekspektasi dari para aktornya bertemu pada area tertentu dalam hubungan internasional. Seperti penjelasan Krasner, kerjasama *sister city* juga memiliki prinsip, norma, peraturan, dan prosedur yang mengikat kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, yang pada akhirnya akan menimbulkan efek sebab akibat bagi keduanya.

Menurut Villiers mengusulkan enam langkah siklus model atau kerangka konseptual kemitraan *sister city* dalam membentuk, mengelola, mempertahankan dan membangun kesuksesan kemitraan dan kemampuan beraliansi, yaitu :

- a. Strategi: kerangka manajemen dimulai dengan perumusan strategi aliansi. Sebelum mitra terlibat, sebuah organisasi memerlukan strategi aliansi untuk menguraikan pemikiran terkait visi dan tujuan untuk kemitraan, strategi untuk

¹³ Jabar Prov. “Perda Kerjasama Jabar”, dalam <http://pemksm.jabarprov.go.id/pages/produkhukum/produk/PERDA%20KERJASAMA%20DAERAH%20No.%209%20Th.%202010.pdf> diakses pada 11 September 2017

pemilihan mitra, untuk manajemen, dan cara menangkap pembelajaran (Villers, 2009). Kern (2001:12) menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan masyarakat lokal perlu strategi, dimana dua strategi yang ditempuh adalah learning dan networking internasional. Dari strategi aliansi akan menjadi jelas jenis mitra yang harus dicari.

b. Identifikasi: dalam mencari mitra strategis, Kota atau komunitas biasanya mendekati lembaga perhubungan internasional dan mungkin juga didekati oleh Kota-Kota atau masyarakat lain dengan kemiripan permintaan. Permintaan tersebut hanya dapat dipertimbangkan jika Kota tersebut ada dalam parameter strategi kerja sama.

c. Mengevaluasi: pada tahap ini diperlukan pula investigasi due diligence dan studi kelayakan untuk mengenal sejarah kerja sama mitra yang potensial. Terdapat banyak kriteria yang berbeda yang digunakan untuk pemilihan mitra, kriteria dapat meliputi ukuran Kota/populasi; kriteria geografis; sejarah politik; alasan filantropis; kepentingan sosial/umum; kepentingan ekonomi; universitas; kemiripan nama; asosiasi lokal.

d. Negosiasi: tahapan ini terbagi ke dalam tiga jenis, yaitu negosiasi dalam pemilihan mitra, negosiasi dalam perencanaan, dan negosiasi dalam membuat kesepakatan (Memorandum of Understanding).

e. Implementasi: tahap ini penting karena semua penilaian terhadap rencana yang telah disepakati telah dilakukan dengan baik sampai saat ini atau tidak. Setelah hubungan diimplementasikan, keberhasilan atau kegagalan perlu ditinjau secara

berkala yang hanya dapat dilakukan jika pengukuran spesifik kinerja telah disepakati dalam tahap perencanaan.

f. Kemampuan aliansi: merupakan titik keberlanjutan yang menyakini bahwa Kota yang memperoleh lebih banyak pengalaman dalam praktik manajemen aliansi terbaik, maka akan lebih baik dalam hubungan kemitraan. Ini dibangun dan dikembangkan melalui peningkatan pengetahuan aliansi, keterampilan (keterampilan kewirausahaan yang spesifik), pengalaman, dan pengembangan perilaku yang tepat, alat aliansi yang tepat, sistem aliansi yang tepat, staf dan struktur organisasi, dan pelatihan/pendidikan.¹⁴

Dari beberapa bidang kerjasama yang dilakukan oleh Kerjasama Sister City Kota Bandung dengan Kota Suwon adalah bergerak dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan menurut **Ki Hajar Dewantara** merupakan proses pembudayaan yakni suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan.³⁰ Konsep pendidikan jelas dituangkan dalam UU Pendidikan RI Nomor 20 Tahun 2003. Bab 1, pasal 1, Butir 1 yaitu Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

¹⁴ Villers (2000) dalam Gina Puspitasari Rohman dan Delik Hudalah “*Evaluasi Keberhasilan Kerjasama Antar Kota Sister City Kota Surabaya*”, Jurnal ITB.

masyarakat, bangsa dan negara. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.¹⁵

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, menimbulkan hipotesis penelitian bahwa: *“Dengan adanya kerjasama sister city antara Kota Bandung dan Kota Suwon dalam bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandung.”*

2.4 Operasionalisasi Variabel

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel		

¹⁵ Tambahan Lembaran Negara RI No.4301 Pendidikan Sistem Pendidikan Nasional. Warga Negara. Masyarakat. Pemerintah. Pemerintah Daerah. Dalam www.inherentdikti.net/files/sisdiknas.pdf, diakses pada 27 Februari 2018

<p>Bebas : Kerjasama <i>Sister City</i> antara Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang pendidikan.</p>	<p>1. Adanya persetujuan kerjasama (MoU) antara Kota Bandung dengan Kota Suwon dalam bidang pendidikan</p>	<p>1. Ditandatanganinya <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) kerjasama <i>sister city</i> Kota Bandung dengan Kota Suwon pada 25 Agustus 1997 dan didalamnya terdapat kerjasama dalam bidang pendidikan</p>
<p>Variabel Terikat : Meningkatkan perkembangan pendidikan di Kota Bandung</p>	<p>1. Adanya program Kerjasama <i>Sister City</i> dalam bidang pendidikan antara Kota Bandung dengan Kota Suwon.</p> <p>2. Kerjasama Universitas Kristen Maranatha dengan Universitas Hanshin, Suwon.</p> <p>3. Program pendidikan musik tradisional Korea (Salmunori) di SMKN 10.</p>	<p>1. Pertukaran Pemuda yang difasilitasi oleh Siwon <i>Youth Foundation</i>. Sumber: Data laporan akhir taun kegiatan 2011, Pemerintah Kota Bandung.</p> <p>2. Bantuan dari Universitas Kyonggi dalam bidang pendidikan berupa alat tulis dan dana bantuan untuk fasilitas PAUD di kelurahan Sukamulya. Sumber: wawancara dengan Han Hadrian S.Ip, Staf fungsional umum bagian kerjasama daerah pemkot Kota Bandung dan http://www.publicanews.com</p> <p>1. Dibukanya kelas bahasa koera di Universitas Maranatha sejak tahun 2011. Sumber: http://news.maranatha.edu/?p=865</p> <p>1. Diadakannya kegiatan kelas musik tradisional di SMKN 10 Bandung dengan memberikan pelajaran dan mempraktekan cara bermain alat musik salmunori. Sumber: Data laporan akhir taun kegiatan 2011, Pemerintah Kota Bandung.</p>

	<p>4. Kerjasama Universitas Pasundan dengan Universitas Kyonggi, Suwon.</p>	<p>Ditandatangani <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) kerjasama Universitas Pasundan Dengan Universitas Kyonggi pada tanggal 1 Juli 2013. Sumber : Data Kerjasama Sister City Pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Barat Dengan Wilayah Di Luar Negeri Sampai Dengan Bulan Maret 2015.</p> <p>2. Kerjasama Universitas Pasundan dengan Universitas Kyonggi dalam program S2 untuk mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan. . Sumber : Data Kerjasama Sister City Pemerintah Kabupaten/ Kota Jawa Barat Dengan Wilayah Di Luar Negeri Sampai Dengan Bulan Maret 2015</p>
--	---	--

2.5 Skema Kerangka Konseptual

Alur Penelitian

“Pengaruh Kerjasama *Sister City* antara Kota Bandung dengan Kota Suwon terhadap Aspek Pendidikan di Kota Bandung”

